

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Partisipasi

2.1.1.1 Pengertian Partisipasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan. Sedangkan secara harfiah partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi mengacu pada turut serta atau berperan aktif dalam suatu kegiatan atau proses. Ini bisa meliputi berbagai bentuk partisipasi, baik itu konteks sosial, politik, atau kegiatan lainnya, yang dilakukan secara sukarela atau aktif (Moeliono, dalam Fahrudin, 2012 hlm. 36).

Menurut Janabrota dalam (Mulyadi, 2019 hlm. 14) mendefinisikan bahwa partisipasi mencakup kontribusi individu tanpa mengorbankan kepentingan pribadi. Ini mencerminkan semangat kerjasama dan kontribusi positif untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengabaikan manfaat individu yang mungkin terkait dengan kegiatan tersebut. Artinya, partisipasi yang efektif biasanya tidak dilakukan secara terpaksa. Pentingnya proses partisipasi adalah memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi sesuai dengan keahliannya dan minatnya sendiri. Dengan demikian, partisipasi menjadi lebih bermakna dan produktif karena melibatkan kontribusi sukarela dan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat yang terlibat. Sejalan dengan partisipasi menurut Mulyadi, (2019, hlm. 23) mengemukakan pendapatnya bahwa partisipasi sering kali diartikan sebagai keterlibatan yang bersifat sukarela, di mana orang terlibat tanpa adanya tekanan atau perintah yang memaksa. Ini menekankan pentingnya kesediaan dan kemauan individu untuk turut serta dalam suatu kegiatan atau proses tanpa merasa terpaksa. Oleh sebab itu partisipasi mempunyai peran penting dalam suatu pembangunan, hal ini karena berdasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki peran sebagai subjek pembangunan. Berbeda dengan Made Pidarta dalam (Dwiningrum, 2011, hlm. 50), partisipasi melibatkan tidak hanya kehadiran fisik seseorang dalam suatu kegiatan,

tetapi juga keterlibatan mental dan emosional. Ini mencakup inisiatif, dukungan, dan tanggung jawab terhadap tujuan bersama yang ingin dicapai melalui keterlibatan tersebut.

Menurut Garrod & Lekaota dalam (Thetsane, 2019 hlm. 128) mengemukakan bahwa syarat dasar dalam melakukan pengembangan pariwisata melibatkan seluruh anggota masyarakat yang tinggal di daerah tujuan wisata, bukan hanya mereka yang terlibat langsung dalam industri pariwisata yang harus terlibat dalam pengelolaan dan perencanaan suatu kegiatan. Melibatkan masyarakat secara luas penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan, memperhatikan kebutuhan lokal, menjaga budaya, dan memastikan manfaat ekonomi tersebar secara adil. Partisipasi masyarakat sangat penting dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan suatu objek wisata, maka harus disadari bahwa dengan ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata merupakan salah satu cara yang penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan dari keberadaan objek wisata tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan atau pengembangan. Melalui partisipasi tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari proses, tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya yang menjadi basis dari objek wisata tersebut (Palimbunga, 2017 hlm. 16).

Dengan demikian, pengertian partisipasi masyarakat menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan, dari pengambilan keputusan hingga evaluasi. Pentingnya kesadaran, keyakinan, dan kepentingan masyarakat dalam partisipasi tersebut memastikan bahwa partisipasi dilakukan secara sukarela dan berkelanjutan, tanpa unsur paksaan. Ketika masyarakat merasa memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap program pembangunan, mereka cenderung lebih terlibat secara aktif dan berkontribusi secara maksimal, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat itu sendiri serta pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Partisipasi

Menurut Theresia (2015, hlm. 207) tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dapat ditentukan oleh tiga unsur pokok:

- a. Masyarakat diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan kesediaan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. Kesempatan tersebut menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk merasa dihargai dan penting dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
- b. Masyarakat bersedia untuk berpartisipasi. Kesediaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sikap mental individu terhadap kehidupannya. Orang yang memiliki sikap mental yang positif dan proaktif cenderung lebih termotivasi untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang dapat membangun atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk membangun sikap mental yang inklusif dan progresif di antara masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya.
- c. Masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi juga merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Meskipun kesempatan untuk berpartisipasi ada, namun jika masyarakat tidak memiliki kemampuan atau sumber daya yang diperlukan untuk terlibat, maka partisipasi mereka akan terhambat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dapat dilihat dari tiga unsur yaitu masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi, masyarakat siap sedia untuk berpartisipasi, masyarakat mempunyai suatu keahlian.

Sedangkan menurut teori Angell dalam Lisdiana (2013) dalam Tumbel (2017, hlm.5), terdapat 5 faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Usia. Usia sangat mempengaruhi terhadap produktivitas seseorang, artinya orang yang relatif muda seringkali mempunyai energi dan kemampuan berpikir yang lebih mumpuni dibandingkan orang yang lebih tua. Oleh karena itu, masyarakat paruh baya dan lanjut usia cenderung lebih banyak partisipasinya dibandingkan kelompok usia lainnya.
- b. Jenis kelamin. Budaya patriarki yang masih tertanam kuat di Indonesia bahwa laki-laki mendominasi daripada perempuan dalam partisipasi masyarakat, dan segala bentuk partisipasi sangat penting bagi pengembangan pariwisata pada khususnya.
- c. Pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai syarat mutlak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Seseorang yang telah mencapai tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki pengetahuan yang lebih luas, sehingga orang yang berpendidikan tinggi akan semakin besar pula kesadarannya untuk berpartisipasi dalam lingkungannya.
- d. Pekerjaan dan pendapatan. Pekerjaan yang baik dan pendapatan yang memadai dapat mendorong partisipasi. Pekerjaan juga mempunyai peran penting dalam menentukan waktu luang seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, termasuk menghadiri pertemuan atau rapat. Orang yang memiliki pekerjaan dengan jadwal yang padat atau tidak teratur mungkin memiliki keterbatasan waktu untuk terlibat dalam aktivitas sosial atau politik. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti pekerjaan dan pendapatan juga perlu dipertimbangkan dalam memahami tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan sosial dan politik.
- e. Lama tinggal. Lamanya seseorang tinggal di suatu tempat dapat mempengaruhi kesadarannya terhadap lingkungan sekitarnya. Semakin lama seseorang tinggal di suatu tempat, semakin dalam pemahamannya tentang masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat meningkatkan keinginan mereka untuk terlibat dalam upaya membangun lingkungan yang lebih baik. Melalui pengalaman jangka panjang, seseorang dapat mengembangkan rasa

tanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya dan merasa lebih terikat untuk berkontribusi dalam upaya perbaikan atau pelestarian lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lamanya tinggal seseorang di suatu tempat dapat menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran dan motivasi untuk bertindak demi pembangunan lingkungan yang lebih baik.

2.1.1.3 Lingkup Partisipasi

Partisipasi atau penyertaan adalah pelibatan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan, termasuk pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil. Ini merupakan fondasi yang kuat untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yadav dalam (Theresia, 2015 hlm. 198-199) menyatakan adanya empat jenis kegiatan yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pembangunan, antara lain:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Forum atau diskusi dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait program pembangunan di tingkat daerah dan lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sebenarnya.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya berarti kontribusi dalam bentuk tenaga kerja, uang, atau sumber daya lainnya sesuai dengan manfaat yang diterima, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai. Kegiatan pengorganisasian masyarakat menjadi penting untuk memastikan keberlanjutannya dari hasil pembangunan tersebut, sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka waktu yang panjang.

c. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Pemantauan dan evaluasi yang teratur terhadap program dan proyek pembangunan sangat penting. Selain memastikan pencapaian tujuan sesuai dengan yang diharapkan, hal itu juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan yang mungkin muncul selama

pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, dapat dilakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari program atau proyek pembangunan tersebut.

d. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Ikut serta dalam pendayagunaan dari hasil pembangunan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kunci untuk mencapai pemerataan hasil pembangunan dan meningkatkan taraf hidup banyak orang. Dengan fokus pada pemerataan hasil pembangunan, masyarakat dapat memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, memanfaatkan hasil pembangunan secara efektif dapat menginspirasi lebih banyak kontribusi dari masyarakat untuk membangun program pembangunan di masa depan yang lebih baik.

2.1.1.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Pasaribu dan Simanjutak (1986) dalam (Fahrudin, 2012 hlm. 39) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran merupakan hal penting dalam pembangunan dan pengembangan dengan memberikan sumbangan ide atau gagasan, pendapat, saran, kritik dan pengalaman masyarakat untuk meningkatkan keberlanjutan kegiatan pengembangan atau pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, maka akan memperoleh beragam perspektif dan solusi yang berpotensi meningkatkan keberlanjutan proyek atau kegiatan yang dilakukan.
- b. Partisipasi tenaga juga sangat berarti dalam upaya meningkatkan, membangun, atau memberikan bantuan kepada sesama. Ketika individu secara sukarela atau tanpa paksaan memberikan tenaganya, ini menunjukkan semangat gotong royong dan kesediaan untuk berkontribusi dalam memajukan kebaikan bersama.
- c. Partisipasi harta benda, yaitu bentuk penyertaan dalam penyediaan materi berupa uang, barang serta penyediaan fasilitas dan sarana untuk kepentingan suatu kegiatan.
- d. Partisipasi keterampilan, merupakan bentuk partisipasi berupa dukungan terhadap keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk

mengembangkan suatu kegiatan. Keterlibatan dalam keterampilan tersebut dapat berupa keahlian yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait dengan pengembangan suatu objek wisata, seperti memberitahukan bagaimana masyarakat setempat supaya ikut berpartisipasi dalam pengembangan yang dilakukan supaya masyarakat setempat dapat merasakan hasil dan manfaatnya ketika pengembangan yang dilakukan berhasil.

- e. Partisipasi sosial, merupakan bentuk partisipasi masyarakat sebagai tanda kekeluargaan, solidaritas, atau keguyuban dalam lingkungan masyarakat, misalnya dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat dengan cara organisasi.

Dari pengertian diatas mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa partisipasi secara khusus dapat terlihat dari bentuk keterlibatan yang diberikan secara nyata atau memiliki wujud seperti halnya partisipasi dalam bentuk uang, benda, materi, tenaga, atau keterampilan. Kemudian, partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata seperti partisipasi ide, gagasan, pemikiran, atau partisipasi sosial.

2.1.1.5 Tipe-Tipe Partisipasi

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Hakim, 2017 hlm. 47) terdapat empat tipe partisipasi yaitu:

- a. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
 Jenis partisipasi ini adalah tentang menentukan pilihan bersama dengan masyarakat menyepakati ide-ide yang bersangkutan dengan kebutuhan bersama. Partisipasi tersebut sangat penting karena dengan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah untuk pembangunan dapat mengambil banyak masukan dan ide-ide. Partisipasi dapat dilakukan melalui pertemuan, diskusi, mempresentasikan ide, menanggapi atau menolak dari pembangunan atau program yang ditawarkan.
- b. Berpartisipasi dalam implementasi
 Jenis partisipasi ini merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, apakah perencanaan, pelaksanaan atau objektif. Pelaksanaan

program membutuhkan partisipasi berbagai faktor, terutama pemerintah dengan kedudukannya, sumber pengembangan utama pembangunan.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Jenis partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program dapat tercapai. Sukses secara kuantitas sebuah pertunjukan akan ditandai dengan peningkatan *output*. Ketika dari segi kualitas kita bisa melihat seberapa sukses persentasenya program telah berlangsung sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.

d. Berpartisipasi dalam evaluasi

Jenis partisipasi ini terkait dengan masalah pelaksanaan program dengan keseluruhan. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui implementasinya apakah program tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau terjadi penyimpangan.

2.1.1.6 Gagasan Partisipasi

Menurut Davis dalam Riyani (2018, hlm. 12) terdapat tiga gagasan penting dalam hakikat partisipasi yaitu: keterlibatan, kontribusi, dan tanggungjawab.

- 1) Keterlibatan mental dan emosional, ialah terlibat secara mental dan emosional daripada aktif materialistis. Keterlibatan ini lebih berupa tindakan psikologis daripada tindakan fisik.
- 2) Motivasi kontribusi, konsep partisipasi yang kedua adalah yang mampu memotivasi orang untuk memberi kontribusi. Masyarakat diberikan kesempatan dalam menyalurkan sumber inisiatif dan kreatifnya untuk mencapai tujuan bersama.
- 3) Tanggungjawab, gagasan ini mengemukakan bahwa partisipasi mendorong masyarakat untuk mampu menerima tanggungjawab partisipasi dalam membantu masyarakat menjadi kelompok yang bertanggungjawab.

2.1.1.7 Tingkatan Partisipasi

Menurut Wilcox dalam Hutagalung (2022, hlm. 14) memiliki lima tingkatan dalam partisipasi, yaitu:

- a. Pemberitahuan (*informing*): Memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana atau kegiatan yang dilakukan. Ini penting agar masyarakat

memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi mereka secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, pembertahuan membantu membangun dasar yang kuat untuk keterlibatan masyarakat lebih lanjut dalam proses tersebut.

- b. **Konsultasi (*consulting*):** Mengumpulkan pendapat dan masukan dari masyarakat terkait rencana atau kegiatan tersebut. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dengan memberikan perspektif mereka, menyampaikan kebutuhan dan kepentingan, serta memberikan masukan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan lebih lanjut. Konsultasi ini merupakan bentuk pengakuan terhadap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat setempat, sehingga dapat membantu memperbaiki dan memperkaya rencana atau kegiatan yang direncanakan.
- c. **Kolaborasi (*involving*):** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Ini berarti memberikan masyarakat peran yang lebih besar dalam proses tersebut, sehingga mereka memiliki kontrol yang lebih besar atas hasil akhirnya. Kolaborasi memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak yang bertanggung jawab, baik itu pemerintah, lembaga non-pemerintah, dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan atau program yang mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi memperkuat hubungan antara berbagai pihak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
- d. **Kemitraan (*partnership*):** Membentuk kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola dan mengembangkan suatu program atau proyek. Kemitraan ini menciptakan kerangka kerja kolaboratif di mana berbagai pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan adanya kemitraan, sumber daya dan keahlian dari berbagai sektor dapat digabungkan untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Hal ini juga memastikan bahwa kebijakan atau program yang diimplementasikan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak

yang terlibat, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

- e. Pemberdayaan (*empowerment*): Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan, mengakses sumber daya, dan memengaruhi perubahan yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat membantu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, proses partisipasi yang efektif dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua pihak dapat turut serta dan merasakan manfaatnya.

Tingkatan partisipasi masyarakat menurut Hobley (1996) dalam (Theresia, 2015 hlm. 204) mengemukakan terdapat tujuh tingkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tingkatan Partisipasi

Tingkatan Partisipasi	Deskripsi
Partisipasi Pasif/Manipulatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat diberikan apa yang sedang atau telah terjadi. • Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat. • Informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
Partisipasi Informatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. • Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian. • Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
Partisipasi Konsultatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi. • Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya. • Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan. • Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditidakklanjuti.

Tingkatan Partisipasi	Deskripsi
Partisipasi Insentif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah. • Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. • Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
Partisipasi Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek. • Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. • Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
Partisipasi Interaktif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. • Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. • Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
<i>Self Mobilization</i> (Mandiri)	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. • Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. • Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Sumber: Hobley (1996) dalam (Theresia, 2015 hlm. 204)

2.1.1.8 Pentingnya Partisipasi

Menurut Conyers dalam (Riyani, 2018 hlm. 15-16) mempunyai tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting:

- a. Legitimasi merupakan salah satu manfaat penting dari partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan *stakeholders* yang terdampak secara langsung, seperti masyarakat setempat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan atau program, proses tersebut menjadi lebih transparan dan akuntabel. Melalui partisipasi, masyarakat dapat merasa bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan legitimasi kebijakan atau program tersebut. Hal ini juga dapat membantu meminimalkan resistensi atau konflik yang mungkin timbul jika keputusan diambil tanpa melibatkan masyarakat yang terkena dampaknya.
- b. Efektivitas yakni melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan atau program dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi karena membawa beragam sudut pandang, pengetahuan, dan pengalaman yang berharga ke dalam proses tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan atau program yang diterapkan.
- c. Akuntabilitas yaitu partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas karena melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga para pemangku kepentingan bertanggung jawab atas kebijakan atau program yang diimplementasikan.

Yoeti dalam (Ramdhan, 2020 hlm. 20) mengemukakan bahwa dengan melibatkan anggota masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dalam program pengembangan objek wisata dengan memanfaatkan berbagai hasil karya dan potensi lokal dapat menjadikan masyarakat sebagai katalisator dalam pembangunan serta mempercepat proses pengembangan objek wisata itu sendiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal dan mempromosikan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata.

2.1.2 Masyarakat

2.1.2.1 Pengertian Masyarakat

Peter L. Berger dalam Margayaningsih (2018, hlm. 76-77) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan seperangkat kompleks hubungan manusia yang secara luas, yaitu keseluruhan yang kompleks itu sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri dari bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Masyarakat pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Orang yang hidup bersama, termasuk setidaknya terdiri dari dua orang
- 2) Bergaul/berbaur dalam waktu yang cukup lama
- 3) Sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan
- 4) Masyarakat adalah suatu sistem hidup bersama

Menurut Ralph Linton dalam Mahyuddin (2019, hlm. 3) masyarakat adalah sekelompok orang atau manusia yang telah hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama. Mereka mampu mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dalam Tejokusumo (2014, hlm. 39) mengartikan masyarakat sebagai individu atau masyarakat yang telah hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Dari pengertian masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia atau orang-orang yang telah hidup berdampingan dalam jangka waktu yang cukup lama, ditempat yang sama sehingga dapat menghasilkan kebudayaannya sendiri. Masyarakat juga merupakan subjek dalam suatu pembangunan program, karena keberhasilan suatu pembangunan tergantung pada masyarakat setempat/lokal.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Masyarakat

Unsur-unsur masyarakat menurut Santosa dalam Ratman (2020, hlm. 12) diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dua orang atau lebih manusia pada suatu kelompok dan berada ditempat yang sama merupakan salah satu unsur penting dari masyarakat. Keberadaan individu-individu ini memungkinkan terjadinya interaksi sosial

dan pembentukan hubungan antar individu yang menjadi dasar dari kehidupan bersama dalam masyarakat.

- 2) Adanya kesadaran dari setiap anggotanya, bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah kesatuan. Kesadaran ini menciptakan rasa solidaritas dan identitas bersama di antara anggota masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat hubungan sosial dan kohesi dalam masyarakat tersebut.
- 3) Adanya proses interaksi yang berlangsung cukup lama dalam masyarakat memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial. Dari hasil interaksi ini, anggota baru dapat terbentuk, dan mereka belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota lainnya. Selain itu, melalui interaksi yang berkelanjutan, masyarakat juga menciptakan aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur perilaku anggotanya untuk memastikan kelangsungan hidup bersama dan keharmonisan dalam masyarakat.
- 4) Menciptakan sebuah kebudayaan dari hasil pemikiran bersama yang disepakati merupakan ciri penting dari masyarakat. Kebudayaan ini mencakup nilai-nilai, norma-norma, tradisi, bahasa, dan praktik-praktik yang digunakan dan dipelihara oleh anggota masyarakat. Kebudayaan menjadi media penghubung di antara setiap anggota masyarakat karena memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan memahami satu sama lain.

2.1.3 Pengembangan Objek Wisata

2.1.3.1 Pengertian Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan menurut Balai Pustaka dalam (Agustini, 2014 hlm. 48) mendefinisikan sebagai suatu proses atau usaha untuk meningkatkan atau menciptakan sesuatu agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dalam hal perencanaan, implementasi, maupun pengendalian. Dalam konteks objek wisata, pengembangan dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan atau mengubah aspek-aspek pariwisata guna memperoleh keuntungan dan manfaat yang lebih baik (Suarto, 2017 hlm. 52). Artinya, proses pengembangan harus direncanakan dengan matang, guna meningkatkan atau menciptakan hal yang baru dan inovatif, kemudian dievaluasi serta disesuaikan agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Menurut Nuryanti (1994) dalam (Putranto, 2021 hlm. 42) mengemukakan pandangannya bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu fenomena dimana masyarakat sebagai *stakeholder* tempat pariwisata tersebut dibangun. Oleh sebab itu, masyarakat harus ikut serta secara aktif dalam seluruh tahapan pengembangan tempat wisata yakni mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, dan tahap evaluasi. Partisipasi dan kerjasama dari seluruh masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan, terutama dalam konteks pengembangan pariwisata. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, peluang kerja juga akan bertambah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Adapun menurut Zakiya dalam (Zaenudin, 2023 hlm. 154) pengembangan pariwisata seringkali menjadi salah satu cara untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Dengan memanfaatkan keindahan alam, warisan budaya, dan atraksi lainnya. Pengembangan pariwisata dapat membantu mempertahankan kelestarian sumber daya alam sambil menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun, penting untuk melakukan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab agar sumber daya alam tersebut tetap terjaga untuk generasi mendatang. Tentu saja pengembangan pariwisata memerlukan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan pariwisata. Masyarakat merupakan salah satu elemen terpenting dimana pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dengan perusahaan atau swasta dalam penyelenggaraan dan pengembangan objek wisata. Dalam menetapkan atau mengembangkan objek wisata, penting untuk memperhatikan kedudukan, potensi, peran, dan partisipasi masyarakat. Sidiq dalam (Sarlina, 2021 hlm. 171) menyatakan bahwa pengembangan objek wisata adalah suatu perubahan terencana yang memerlukan partisipasi menyeluruh dari masyarakat lokal. Melibatkan masyarakat akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan dan keberlanjutan objek wisata tersebut.

Kadir (2022, hlm. 214) mengungkapkan bahwa objek wisata merupakan tempat yang dijadikan sebagai pusat daya tarik yang akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pengunjung atau wisatawan. Untuk dapat bersaing dengan wisata lainnya tentu harus memiliki kemampuan pengelolaan dan pengembangan potensi

objek wisata yang akan diperkenalkan untuk dapat menarik pengunjung dan menganggapnya suatu keistimewaan. Selain itu, objek wisata biasanya dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas penunjang yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata, seperti akomodasi, transportasi, tempat makan, dan fasilitas rekreasi lainnya. Fasilitas-fasilitas ini membantu memastikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung selama berkunjung dan memperkaya pengalaman pariwisata bagi pengunjung.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan objek wisata masyarakat merupakan *stakeholder* dalam kegiatan pengembangan yang dilakukan. Karena keikutsertaan masyarakat akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya pengembangan yang telah direncanakan. Masyarakat ikut serta secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, serta evaluasi. Tujuan dalam pengembangan objek wisata yang melibatkan masyarakat secara aktif ialah untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Munasef dalam Rahmawati (2022, hlm. 32-33) mengemukakan bahwa pengembangan objek wisata melibatkan agenda kegiatan dan upaya yang terpadu untuk menarik minat wisatawan. Ini termasuk peningkatan sarana dan prasana, pengembangan fasilitas, serta penyediaan barang dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh pengunjung untuk menunjang kenyamanan selama berkunjung. Pendekatan yang terpadu dan terencana ini mambantu menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik bagi pengunjung dan mendukung pertumbuhan industri pariwisata secara keseluruhan. Dalam melakukan perencanaan pengembangan suatu objek wisata memiliki beberapa tahapan diantaranya adalah:

- 1) Riset Pasar (*Marketing Research*)

Untuk mengembangkan potensi objek wisata perlu dilakukan marketing research atau riset pasar. Riset pasar tentu saja dilakukan disektor pariwisata sehingga memungkinkan untuk mengungkap objek wisata yang diperlukan dan sukses dengan pengunjung yang tentunya dapat dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat setempat. Adanya riset pemasaran (*marketing reseach*) ini adalah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan

serta mengikuti perubahan zaman. Dengan riset pasar ini maka mampu mendapatkan hasil yang maksimal.

2) Analisis Situasi (*Situational Analysis*)

Tentunya pengembangan objek wisata harus sesuai dengan situasi atau keadaan saat ini, melakukan analisis geografi dan administrasi untuk menghasilkan perencanaan pengembangan yang maksimal. Dalam pengembangan objek wisata hendaknya direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan situasi atau kondisi lingkungan dan kondisi wisatawan atau kepentingan wisatawan.

3) Sasaran Pemasaran (*Marketing Target*)

Dalam riset pasar tentunya perlu dilihat dan dievaluasi khalayak mana yang akan dituju, wisatawan mana, tidak hanya di bidang pariwisata tetapi juga di bidang perdagangan dan lainnya pun perlu juga terlebih dahulu jenis pasar sasaran apa dan bagaimana yang kita tuju, untuk mempermudah proses perencanaan.

4) Promosi Objek Wisata (*Tourism Promotion*)

Dalam proses pemasaran tentunya harus ada promosi dan publikasi untuk dapat dengan mudah menyebarkan informasi tentang tempat wisata apalagi di era yang sangat modern ini promosi sangat mudah dengan memberikan konten berupa gambar, video yang aesthetic dan mencantumkan lokasi dalam video tersebut, yang kemudian diunggah di platform media sosial baik itu tiktok, instagram, facebook bahkan bisa menggunakan youtube. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan suatu objek wisata tentunya sangat diperlukan terutama dalam hal promosi.

5) Pemberdayaan Masyarakat Setempat

Dengan adanya suatu pembangunan atau pengembangan suatu objek wisata tentunya tidak lepas dari kontribusi masyarakat setempat dimana masyarakat ikut merasakan keuntungan/manfaat baik secara finansial, maupun secara intelektual. Tidak hanya diuntungkan dari hasil suatu kegiatan wisata, tetapi masyarakat setempat/lokal diajak serta dilibatkan ikut berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan objek wisata terdiri dari 5 tahapan dalam merancang pengembangan objek wisata, yaitu: Pertama; yang harus kita perhatikan adalah riset pasar, dilakukan untuk melihat minat dan apa yang sedang ramai dibicarakan yang tentunya dapat dilakukan dan dikembangkan dalam pengembangan objek wisata. Kedua; melihat keadaan atau situasi, sebagai pelaku dan perencana tentunya kita harus melihat situasi dan keadaan dalam pengambilan keputusan agar dapat diterima dipasaran atau oleh wisatawan. Ketiga; dalam melakukan riset pasar kita harus melihat juga target atau siapa saja yang kita tuju sebagai target utama dalam suatu program yang akan dikembangkan tersebut. Keempat; harus mampu mempromosikan atau membuat sebuah konten tentang keadaan suatu objek wisata yang indah sehingga mampu menarik pengunjung untuk berkunjung. Kelima; dengan adanya objek wisata dan pengembangan yang dilakukan tentunya harus dapat memberdayakan masyarakat setempat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Yoeti dalam (Haryati, 2022 hlm. 31) mengemukakan bahwa pengembangan daya tarik objek wisata merupakan segala sesuatu yang ada pada suatu daerah tujuan wisata yang dapat dijadikan sebagai daya tarik masyarakat untuk menimbulkan rasa ingin berkunjung ke tempat tersebut.

Sesuai pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengembangan objek wisata alam melibatkan peningkatan sumber daya alam yang ada untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah tersebut. Dalam proses pengembangan, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti potensi kawasan wisata, kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal, serta kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Rencana tata ruang wilayah menjadi penting sebagai panduan untuk mengatur pengembangan objek wisata agar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pengembangan objek wisata harus sejalan dengan perkembangan teknologi karena perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pada perencanaan pengembangan objek wisata, dengan kecanggihan teknologi akan menarik wisatawan karena fasilitas modern yang disediakan oleh tempat wisata tersebut. Sehingga pengunjung akan merasa puas dengan apa yang disuguhkan dan

akan membuat pengunjung merasa ingin tinggal lebih lama di tempat wisata sehingga akan menimbulkan rasa ingin berkunjung kembali (Murti, dalam Kadir, 2022 hlm. 214-215).

Menurut Diwangkara (2020, hlm. 122) dalam pengembangan kegiatan pariwisata ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Daya Tarik (*Attraction*)

Menurut Suwena dalam (Diwangkara, 2020 hlm. 122), mengungkapkan atraksi atau objek daya tarik wisata (ODTW) merupakan komponen yang signifikan dalam menarik kedatangan wisatawan. Hal yang dikembangkan menjadi atraksi objek wisata disebut dengan modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan ada tiga: 1) *Natural Resources* (alami) seperti gunung, danau, pantai dan bukit; 2) atraksi wisata budaya seperti arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, seni dan kerajinan, ritual, festival, kehidupan masyarakat sehari-hari, keramahtamahan, makanan; dan 3) atraksi buatan seperti acara olahraga, berbelanja, pameran, konferensi dan lain-lain.

2. Aksesibilitas (*Accessibility*)

Menurut Sunaryo dalam (Diwangkara, 2020 hlm. 122) mengemukakan bahwa aksesibilitas pariwisata didefinisikan sebagai “segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait”. Sejalan dengan pengertian *accessibility* menurut Isdarmanto (2017, hlm. 18-19) merupakan sarana dan infrastruktur untuk menuju tujuan daerah wisata. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu petunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah objek wisata. Akan tetapi *accessibility* juga bukan hanya menyangkut terbatas pada alat transportasi, tetapi juga meliputi semua aspek yang dapat mempermudah pengunjung atau wisatawan dalam melakukan perjalanan ke tempat daerah wisata.

3. Fasilitas (*Amenities*)

Menurut Sugiama (2011) dalam (Diwangkara, 2020 hlm. 123) *amenities* merupakan serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengunjung selama menjadi wisatawan seperti sarana akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan (*entertainment*), tempat perbelanjaan (*retailing*), toilet, masjid, *rest area*, tempat parkir dan layanan lainnya.

4. Layanan Tambahan (*Ancillary Service*)

Sugiama dalam (Diwangkara, 2020 hlm. 123) mengemukakan *ancillary service* mencakup keberadaan berbagai organisasi untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan objek wisata yang bersangkutan. Layanan tambahan seperti keramah tamahan masyarakat merupakan hal penting untuk memberikan kesan, kenangan, kepuasan kepada wisatawan, serta mampu menciptakan pandangan positif dari pengunjung (Mill, dalam Isdarmanto, 2017 hlm. 20).

2.1.3.2 Tujuan Pengembangan Objek Wisata

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005) dalam Andajani (2017, hlm. 53-54) pariwisata memiliki relevansi yang penting dari sisi kepentingan nasional, karena tujuan pembangunan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan pokok, di antaranya:

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata dianggap mampu menciptakan rasa bangga dan cinta melalui kegiatan pariwisata di Indonesia dari populasi di seluruh negara. Dengan banyaknya warga yang mengunjungi tempat-tempat wisata di luar tempat tinggal mereka, diharapkan dapat menambah rasa memiliki persaudaraan dan pemahaman akan keberagaman untuk meningkatkannya rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Penghapus Kemiskinan

Pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberi atau menawarkan pada semua masyarakat Indonesia kesempatan untuk mencoba dalam bekerja. Adanya kunjungan wisatawan ke daerah diharapkan dapat memaksimalkan perbaikan melalui kesejahteraan pada masyarakat setempat, baik melalui tenaga kerja maupun dengan industri disekitar objek wisata.

c. Pembangunan Berkesinambungan atau Berkelanjutan

Objek wisata memamerkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah-tamahan, dan pelayanan. Objek wisata memiliki keunggulan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Dengan demikian, dapat memperpanjang masa pengelolaannya untuk dinikmati oleh generasi mendatang.

d. Pelestarian Budaya

Pembangunan yang berfokus pada pelestarian budaya merupakan upaya untuk menjaga warisan budaya suatu negara atau daerah melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang bijaksana terhadap objek wisata. Dengan pendekatan yang tepat, dapat memastikan bahwa kekayaan budaya tersebut tetap terjaga dan asri.

e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Asasi Manusia

Objek wisata juga memenuhi kebutuhan hidup dan hak asasi manusia dengan memberikan waktu libur yang lebih panjang untuk melakukan perjalanan wisata, yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan fisik dan mental serta memperkaya pengalaman hidup.

f. Peningkatan Ekonomi dan Industri

Pariwisata yang baik dapat memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata.

g. Pengembangan Teknologi

Dalam konteks perkembangan teknologi, semakin canggihnya teknologi mendorong persaingan dalam mendatangkan wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi juga menjadi aspek penting dalam industri pariwisata untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan pengalaman wisatawan. Sehingga, kebutuhan akan teknologi tinggi pada masyarakat setempat dapat jadi hal yang sangat penting dalam hal mempromosikan objek wisata untuk menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Objek Wisata

Adapun beberapa jenis objek wisata dan daya tarik wisata menurut Hadiwijoyo, S. S. (2018, hlm. 22), antara lain sebagai berikut:

a. Objek Wisata Alam/Ekowisata

Objek wisata alam merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata dalam keadaan alaminya atau setelah dilakukan upaya budidaya. Tujuan utamanya yaitu untuk mengeksplorasi, mengagumi, dan menikmati pemandangan alam yang asri, serta kekayaan hayati yang dikandungnya seperti fauna dan flora, serta budaya lokal daerah tersebut (Honey, 1999 dalam Luchman, 2004 hlm. 25).

b. Objek Wisata Sosial Budaya

Wisata Sosial ini terlihat antik karena dikaitkan dengan tradisi yang diturunkan secara turun temurun, serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata seperti museum, situs sejarah, upacara adat, kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan lain-lain.

c. Objek Wisata Minat Khusus

Wisata minat khusus adalah wisata berbasis rekreasi yang mengarahkan pada petualangan, tantangan, dan pencapaian wisatawan yaitu dengan melalui interaksi dengan alam. Objek wisata ini kini berkembang pesat dengan bantuan fasilitas-fasilitas penunjang kebutuhan pengunjung yang ahli di bidangnya (Sari, et. al. 2018 hlm. 14). Mendaki gunung merupakan salah satu contoh wisata minat khusus.

2.1.3.4 Faktor-Faktor Pengembangan Objek Wisata

Dalam tahap mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus memperhatikan berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan suatu daerah tujuan wisata. Isdarmanto (2017, hlm. 71-72) mengungkapkan faktor-faktor tersebut yang harus diperhatikan oleh pengelola objek wisata dalam pengembangan objek wisata adalah mengaplikasikan sapta pesona, yaitu sebagai berikut:

- 1) Indah, keindahan objek yang dijadikan sebagai daya tarik wisata mampu menjadi daya tarik khusus dari aspek kondisi alamnya, seperti tata letak ruang,

keunikan bentuk bangunan serta pernak-pernik assesories yang sesuai dengan lingkungan yang ada.

- 2) Aman, faktor jaminan kewanan dan kenyamanan berwisata; terbentuknya privasi individu maupun kelompok dalam menikmati suasana berwisata.
- 3) Tertib, infrastruktur yang dikelola dengan baik, rambu-rambu, petunjuk yang jelas, tanda-tanda larangan, area parker dan sebagainya.
- 4) Bersih, kondisi nyata lingkungan dan keberadaan fasilitas sarana, prasarana objek wisata yang terjamin bersih dan berkualitas akan mampu memberikan nyaman bagi wisatawan dalam menggunakan fasilitas yang ada.
- 5) Sejuk, suasana lingkungan yang dapat dinikmati pengunjung selama berkunjung sehingga mampu menciptakan rasa nyaman dalam berwisata.
- 6) Ramah, sikap dan perilaku sumber daya manusia objek wisata sebagai pengelola dalam memberikan pelayanan mampu memberikan rasa puas kepada pengunjung.
- 7) Kenangan, yaitu suatu *moment* yang indah sehingga mampu menciptakan suatu kenangan baik dari ciri khas objek wisata tersebut maupun dari tempat-tempat wisata yang dijadikan *spot* foto.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Desti Fitriani Rahmawati (2022) yang berjudul “Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata”. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah partisipasi pemuda karang taruna dalam mengembangkan potensi desa wisata, yang melibatkan kegiatan seperti pelatihan, pengembangan infrastruktur, promosi, dan lainnya. Sedangkan penelitian ini dilakukan supaya mengetahui langkah yang dilakukan oleh pemuda karang taruna dalam pengembangan objek wisata. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, bertujuan untuk mengetahui partisipasi yang diberikan oleh masyarakat serta sama-sama meneliti tentang pengembangan objek wisata.

- 2.2.2** Penelitian yang dilakukan oleh Zelfa Aletta Salsabil (2021) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Bagendit II Dalam Kemandirian Berwirausaha” (studi di Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada pelaksanaan pemberdayaan melalui seleksi wilayah, sosialisasi, serta tahap pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta pendampingan. Pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata Bagendit II dalam kemandirian berwirausaha berjalan cukup baik dilihat dari indikator keberdayaan masyarakat. Program Desa Wisata Bagendit II dapat memberdayakan masyarakat karena yang mengikuti kegiatan tersebut mampu mandiri dalam berwirausaha.
- 2.2.3** Penelitian yang dilakukan oleh Mastur Budi Ramadhan (2020) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Hutan Pinus Berbasis Ekonomi Kerakyatan”. Pada penelitian tersebut tujuannya untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pengembangan objek wisata Hutan Pinus dan dampaknya terhadap kondisi perekonomian masyarakat di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Hasilnya menunjukkan partisipasi yang sangat baik dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil pengembangan objek wisata. Selain itu, pengembangan objek wisata Hutan Pinus juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, seperti berkurangnya pengangguran, peningkatan pendapatan, dan pemerataan keadilan sosial. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendalami fenomena tersebut dengan lebih mendalam.
- 2.2.4** Penelitian yang dilakukan oleh Vina Permana Delima (2021) yang berjudul “Pemberdayaan Pemuda Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)”, (studi pada Unit Usaha Wisata Sukageuri View BUMDes Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten

Kuningan). Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memahami bagaimana pemberdayaan pemuda melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*). Hasilnya menunjukkan bahwa dalam proses tersebut, terdapat beberapa langkah pemberdayaan, seperti pemungkinan, penyuluhan, sosialisasi, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Kolaborasi yang berlanjut antara BUMDes Cisantana, pemuda Desa Cisantana, dan proses pengelolaan pariwisata mampu menghasilkan perubahan signifikan dalam kepemilikan aset pemuda dan mendorong pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan.

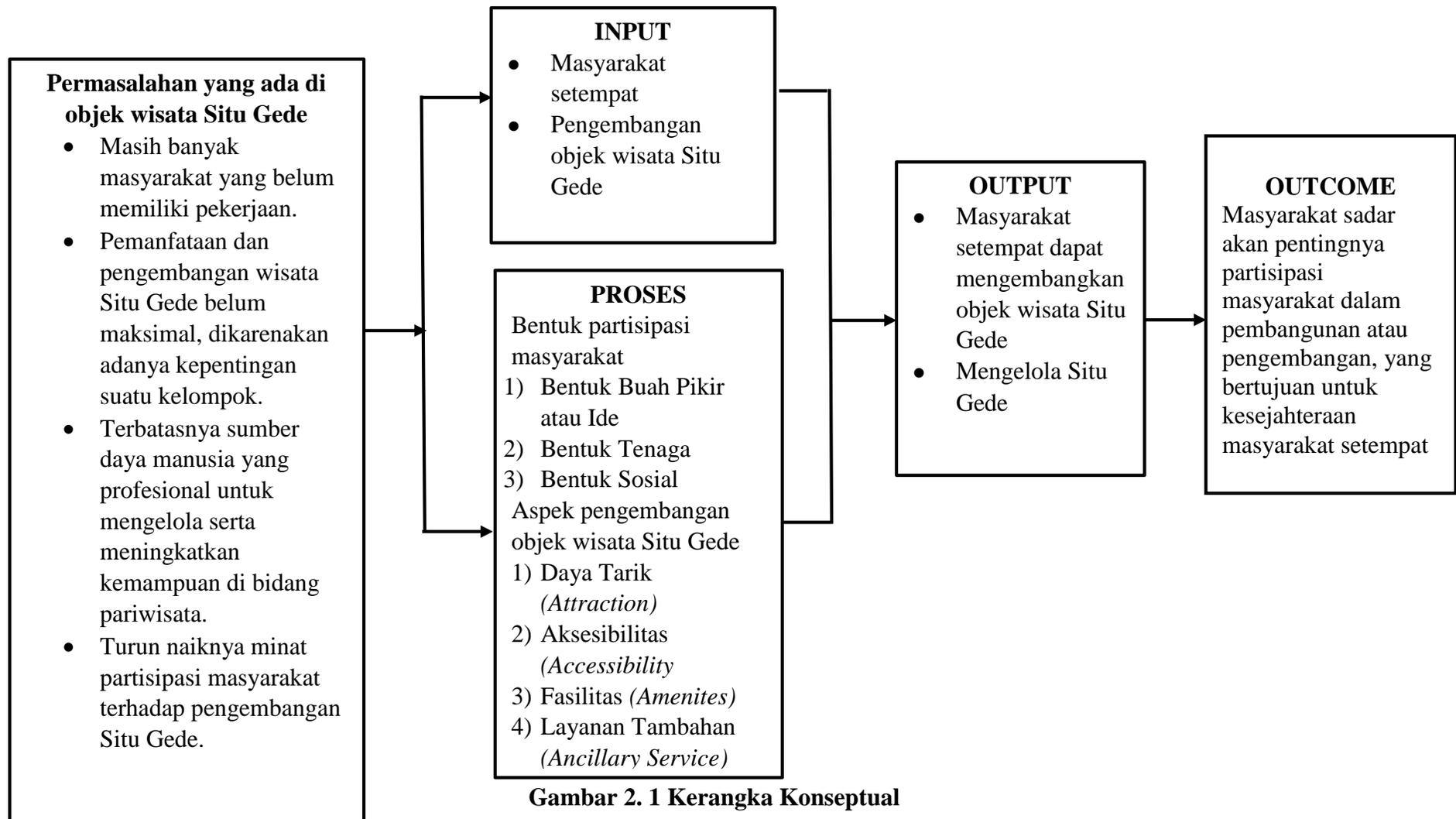
- 2.2.5** Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati (2021) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Pesona Golempang di Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui catatan atau daftar objek potensial yang ada di Pesona Golempang, serta untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pesona Golempang, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan peneliti ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Situ Gede dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah melakukan penelitian untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan suatu objek wisata.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono 2019, hlm. 379). Kerangka konseptual ini berasal dari konsep atau teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Dengan menggunakan kerangka konseptual ini, diharapkan akan lebih mudah untuk memahami konsep yang ada dalam penelitian. Judul penelitian yang diambil yaitu “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Situ Gede”. Penelitian ini dilaksanakan di objek wisata Situ Gede untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi yang

diberikan oleh masyarakat. Bagian permasalahan yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, belum maksimalnya pemanfaatan atau pengembangan, dikarenakan adanya kepentingan suatu kelompok, serta terbatasnya sumber daya manusia yang profesional untuk mengelola serta meningkatkan kemampuan dalam bidang kepariwisataan. Serta naik turunnya minat partisipasi dari masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Situ Gede. Input penelitiannya adalah masyarakat setempat terhadap pengembangan objek wisata Situ Gede. Prosesnya yaitu bentuk-bentuk partisipasi serta aspek pengembangan objek wisata. Outputnya adalah masyarakat setempat dapat mengembangkan objek wisata serta mengelola Situ Gede. Kemudian outcomenya adalah masyarakat sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau pengembangan, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut gambaran kerangka konseptual dari peneliti yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah dalam mengarahkan proses pengumpulan data dan informasi mengenai aspek yang akan diteliti, maka peneliti merincikan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Situ Gede?
2. Bagaimana pengembangan objek wisata Situ Gede?